Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Australia, merupakan negara paling baru yang mengesahkan pernikahan sesama jenis setelah lebih dari 20 negara lainnya yang mengesahkan pernikahan ini. Aktivistis gay pertama yang menyuarakan tentang pernikahan sesama jenis pada awal tahun 1980-an memberikan kontroversial pada dunia amandemen undang-undang. Meskipun tidak mendapatkan timbal balik dengan cepat, pada akhirnya isu ini mendapatkan tanggapan dari berbagai negara yang memulai mengesahkan undang-undang tersebut. Australia sendiri mulai mempertimbangkan pengesahan ini ketika isu tentang LGBT kembali marak dibicarakan pada tahun 2016 lalu. Akhirnya, Pengesahan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Peter Cosgrove yang mewakili Ratu Elizabeth selaku kepala negara Australia dengan menandatangani rancangan undang-undang tersebut pada tanggal 8 Desember 2017 lalu (voaindonesia.com, 2018, para. 3). Pengesahan ini dilandasi dengan *voting* di dalam lingkup nasional yang dilakukan oleh pemerintah Australia dari 12 September sampai 7 November 2017 lalu yang melibatkan 12,7 juta warga atau sebanyak 79,5 persen dari semua warga Australia.

Hasilnya sebesar 61,6 persen setara dengan 7.817.247 warga menyetujui pernikahan sesama jenis (Azizah, 2017, para. 3).

Pasangan sesama jenis harus menunggu 30 hari setelah undang-undang itu disahkan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan pertama yang diperkirakan Parlemen Australia akan dilakukan pada 9 Januari 2018 lalu ternyata dipatahkan oleh Lauren Price (31) dan Amy Laker (29). Kedua pasangan itu mencetak sejarah karena telah melakukan pernikahan sesama jenis pertama dibawah Undang-Undang Australia dengan resmi. Pasangan tersebut telah mengucapkan janji setia pada hari Sabtu 16 Desember 2017 lalu di Sydney, New South Wales, dimana hari itu adalah tepat satu minggu setelah undang-undang tersebut disahkan. Pasangan tersebut mendapatkan dispensasi dikarenakan salah satu dari kedua wanita itu mengidap penyakit yang diperkirakan tidak akan bertahan lama lagi (Prastiwi, 2017, para. 1). Pada tanggal 8 Januari 2018 tengah malam, puluhan pasangan sesama jenis sama-sama menunggu dan melakukan pernikahan saat jarum jam sudah berpindah melewati angka 12 atau masuk ke tanggal 9 Januari 2018, 30 hari tepatnya setelah undang-undang tersebut disahkan. Salah satu pasangan tersebut datang dari atlit olimpiade Australia yaitu Craig Burns dan Luke Sullivan (voaindonesia.com, 2018, para. 2).

Fenomena LGBT ini tentu mendapat kritikan pro dan kontra dari bermacam lapisan masyarakat. Sebagai contoh, Negara Belanda yang pro mendukung fenomena ini karena sudah melegalkan pernikahan sesama jenis tepatnya pada tanggal 1 April 2001 silam secara undang-undang (Shahab, 2018, para. 1). Setelah aktivis gay pertama

tersebut menyebarkan isu ini, 15 tahun kemudian pada tahun 1996, Belanda resmi mengesahkan pernikahan sesama jenisnya. Undang-Undang yang disahkan pada 1 April 2001 silam tersebut juga mengatur hak pasangan untuk bercerai dan mengadopsi anak. Setelah disahkan, terdapat sebanyak 16.000 pasangan sesama jenis yang melaksanakan pernikahan di negeri kincir angin tersebut.

Namun, negara lainnya masih banyak yang menentang fenomena LGBT seperti ini, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, LGBT diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an, kemudian fenomena ini mulai berkembang di tahun 1980 hingga 1990, dan mulai marak dibicarakan kembali pada tahun 2000-an (Agung, 2016, para 5). Dilansir dari sindonews.com (2016) komunitas LGBT terbesar di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1982 menuju tahun 1992. Setelah 25 tahun lamanya bersembunyi sekarang akhirnya mereka berani keluar menyuarakan suaranya. Melalui pemberitaan di atas memaparkan bahwa isu LGBT banyak disuarakan oleh media massa. Media sebagai salah satu sumber informasi, dalam pemberitaannya memainkan fungsi bahasa ini secara sangat cerdas. Di era keterbukaan ini, media tidak hanya membatasi dirinya sebagai penyebar informasi atau berita, melainkan bisa membujuk dan menimbulkan persepsi sendiri. Kata-kata yang dimuat oleh media massa bisa berdampak terhadap masyarakat begitu juga dalam pembentukan persepsi. Penggunaan bahasa tersebut juga akan berpengaruh terhadap kesan positif atau negatif dari pemberitaan tersebut. Salah satu media massa yang banyak digunakan adalah media *online*.

Media Online merupakan *new media* yang cepat berkembang. Seiring berjalannya waktu, dahulu yang sulit mengakses internet, sekarang semakin banyak perusahaan internet yang dengan mudahnya dapat memberikan akses dimanapun. Salwen (2006) dalam bukunya *Online News and the Public* menyatakan bahwa diseluruh dunia surat kabar *online* sudah bertumbuh pesat pada akhir tahun 1990-an. Media yang mempopulerkan *world wide web* dapat mendapatkan keuntungan dari kemudahan penggunaan portal oleh khalayak (Salwen, 2006, p. 6). Data dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dalam (Adam, 2017, para. 4), AJI melakukan riset terhadap 20 media *online*, cetak, lokal dan nasional. Riset dilakukan selama 35 hari mulai dari 15 Juli-20 Agustus 2016). Hasilnya ada 123 berita yang membahas LGBT, media online menduduki angka 86,99 %, sisanya 13,01% adalah media cetak.

Penulis melakukan riset artikel melalui tiga portal *media online* yaitu republika.co.id, metrotvnews.com, dan sindonews.com. Penulis melakukan riset kepada tiga media itu berdasarkan data yang didapat dari Riska Carolina, *Deputy of Internal Affair SGRC (Support Group and Research Center on Sexual Studies)* UI, yang juga menjabat sebagai *Human Right Researcher* di Lembaga ELSAM. Riska menyatakan tiga media *mainstream* tersebut yang banyak menaikan isu terkait LGBT. Penulis menemukan 68 artikel tentang LGBT di republika.co.id, 25 artikel di metrotvnews.com dan 224 artikel di sindonews.com. Riset artikel ini dimulai dari tanggal 16 Oktober 2013-6 Mei 2018. Peneliti memilih sindonews.com karena artikel yang memuat LGBT mencapai angka terbanyak dari beberapa media lainnya. Angka

pembaca yang ada pada salah satu berita di media *online* tersebut mencapai angka 23.000 pembaca. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya khalayak yang mengetahui pemberitaan tentang LGBT ini melalui media *online*.

Sayangnya, Vika Larasati seorang aktivis dari *Youth Interfaith Forum on Sexuality* (YIFOS) dalam (Dagur, 2014, para. 3) menyatakan bahwa pemberitaan di media massa ada yang mendukung pernyataan bahwa LGBT adalah hal yang menyimpang. Menurut Vika, peran media itu sangat besar dalam memengaruhi pandangan publik terhadap kelompok atau individu LGBT. Aktivis LGBT ini juga menganggap bahwa pemberitaan di media massa ini berkontribusi pada angka kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT. Selain dari pemberitaan media massa, salah satu komunitas LGBT yaitu Arus Pelangi menyuarakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh beberapa pejabat pemerintahan berdasarkan data yang sudah peneliti sebutkan diatas, dapat menimbulkan aksi kekerasan terhadap kelompok dan individu LGBT.

Berdasarkan riset data yang dilakukan oleh komunitas Arus Pelangi pada tahun 2013, mereka menyatakan bahwa angka kekerasan yang dialami oleh teman-teman minoritas seksual mencapai 89,3 % di Indonesia. Kekerasan psikis mencapai angka 79.1%, 46.3% di kekerasan secara fisik, 26.3% pada kekerasan ekonomi, 45.1% pada kekerasan seksual, dan 63.3% pada kekerasan budaya (AP/AS, 2016, para. 4). Indonesia dianggap menentang adanya LGBT juga dapat dilihat dari beberapa pejabat negara yang menyuarakan suaranya untuk menentang LGBT. Seperti Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek), Mohamad Nasir yang ikut memberikan larangan kepada teman-teman minoritas seksual untuk masuk universitas karena perilaku mereka dianggap tidak sesuai dengan nilai kesusilaan bangsa. Begitu juga Kementerian Komunikasi yang mendesak perusahaan media sosial dan layanan pesan berbasis internet untuk menghapus *emoticon* yang menggambarkan LGBT. Serta Anies Baswedan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan bahwa LGBT adalah bentuk dari perilaku menyimpang (AP/AS, 2016, para. 2).

Hal ini juga diperkuat melalui pernyataan dari Riska Carolina, beliau adalah *Deputy of Internal Affair SGRC (Support Group and Research Center on Sexual Studies)* UI, yang juga menjabat sebagai *Human Right Researcher* di Lembaga ELSAM. Melalui data yang ada Riska mengatakan dari bulan Desember 2017 hingga Februari 2018 ada sekitar 47 ujaran kebencian yang diucapkan oleh pejabat publik melalui media *mainstream* berbasis *online*. Ujaran tersebut tentunya sangat jelas mendiskriminasi LGBT. Beliau mengatakan bahwa media berpengaruh besar dalam membentuk opini publik. Dalam pemberitaan LGBT Riska mengatakan bahwa media kebanyakan hanya mengambil dari satu sisi saja. Sisi yang dianggap mereka benar, mereka menganggap isu tersebut benar dan mencari validasi melalui pembaca yang akan menganggap itu benar. Seharusnya media bisa memerhatikan netralitas dalam pemberitaannya. Persaingan secara sehat juga harus dijunjung tinggi dalam pemberitaan. Untuk menarik pembaca tidak perlu memberitakan secara subjektif. Khalayak itu aktif, maka beritakanlah secara netral lalu biarkanlah masyarakat memilih

berita mana yang bisa dipercaya dan untuk diterima. Beliau mengatakan bahwa literasi media yang ada di Indonesia belum terlalu bagus. Masyarakat yang diberikan kemudahan dalam teknologi banyak yang tidak memerhatikan jika ingin menyebarkan berita. Kebanyakan tidak dibaca dulu seperti kontennya apa jadi penyebar juga tidak tahu apa yang disebarkan. Sehingga konten yang memiliki kata LGBT banyak disebarkan dan biasanya langsung dipandang buruk oleh khalayak yang melihatnya.

Salah satu contoh kasus yang diberikan oleh Riska, pemberitaan di media juga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap SGRC UI. Tahun 2016 pemberitaan di media secara tidak langsung mengatakan bahwa SGRC UI adalah komunitas LGBT. Setelah mendapatkan konfirmasi dari ketua sekaligus pembentuk SGRC UI, banyak media yang menurunkan pemberitaan tersebut. Riska sendiri mengatakan bahwa SGRC UI itu adalah pelatihan untuk *peer counsellor*, dinamakan support group karena SGRC UI dibentuk untuk membantu teman-teman korban kekerasan seksual. Mereka hanya membahas seputar kekerasan seksual, alat reproduksi, mengenal lebih dalam apa itu homoseksualitas. SGRC UI juga menjadi tempat untuk berdiskusi teman-teman yang memang juga menganut minoritas seksual. SGRC UI juga menjadi tempat konseling untuk teman-teman yang menjadi korban *bullying* karena minoritas seksual yang dimiliki. Tetapi bukan berarti SGRC UI ini merupakan kelompok biro jodoh untuk mempertemukan satu dengan yang lainnya. Riska juga mengatakan bahwa penggunaan kata LGBT di media juga termasuk salah satu diskriminasi serta tidak

kondusif untuk pemberitaan. Bahkan juga sebenarnya SGRC UI sendiri hampir tidak pernah menggunakan kata LGBT dalam diskusi yang sering mereka bawaan. Untuk itu Riska mendorong teman-temannya untuk tidak menggunakan kata LGBT. Beliau mendorong untuk teman-teman melakukan advokasi yang lebih besar untuk mencari satu kata yang lebih bagus, untuk itu Riska menyarankan bagaimana jika kita menggunakan sebutan minoritas seksual dibandingkan dengan LGBT.

Melalui pernyataan yang dibuat oleh Vika dan Riska Carolina, peneliti mencoba untuk mencari bentuk pemberitaan yang dianggap mendiskriminasi kelompok LGBT. Riska Carolina dalam risetnya mengatakan bahwa pemberitaan yang cenderung mendiskriminasi berada di portal media *mainstream* seperti *sindonews.com*, *Republika.co.id*, dan *metrotvnews.com*. Peneliti menemukan beberapa pemberitaan di portal *online* ketiga media tersebut yang membahas tentang fenomena LGBT ini. Peneliti menemukan dari beberapa portal media *online* yang dalam pemberitaannya menggunakan bahasa yang kurang pantas untuk digunakan dalam memberitakan. Peneliti juga menemukan ujaran-ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh pejabat publik. Melalui studi ini, peneliti tertarik untuk mengkaji khalayak media. Bagaimana khalayak menerima pemberitaan tersebut yang dianggap mendiskriminasi teman-teman dengan ragam *gender* dan minoritas seksual.

Menurut Hadi (2008) salah satu cara untuk mengukur khalayak media adalah dengan menggunakan analisis resepsi, dimana analisis ini dianggap mencoba memberikan makna atas pemahaman teks media dengan memahami karakter teks

media yang dibaca oleh khalayak. Menurut Stuart Hall (dalam Baran, 2008, p. 269) riset khalayak memiliki fokus pada analisis dalam konteks sosial dan politik dimana isi media diproduksi dan dikonsumsi oleh khalayak. Analisis resepsi berfokus pada perhatian individu dalam proses komunikasi massa (*decoding*), Utamanya pada proses individu memaknai dan memahami secara mendalam atas teks media dan bagaimana individu menginterpretasikan isi media (Baran, 2008, p. 269-270). Menurut McQuail (dalam Hadi, 2008, p. 5) analisis resepsi menekankan pada penggunaan media untuk refleksi dari konteks sosial budaya dan merujuk pada proses dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas pengalaman dan produksi. Hasil dari analisis ini nantinya berupa representasi pemahaman khalayak berdasarkan identitas sosial dan posisi subjek.

Pengumpulan data melalui metode ini dapat menggunakan *Focus Group Discussion*, dimana menurut Hadi (2008) peneliti akan mengetahui dasar motivasi, alasan, dan argumentasi dari pendapat seseorang. Peneliti juga bisa mempertimbangkan bermacam faktor yang bisa memengaruhi pembaca dalam memahami teks media. Seperti memerhatikan pengalaman pembaca terhadap isu pada naskah berita media dari perspektif subjek. Lalu bagaimana makna yang tercipta melalui teks media menurut kelompok tertentu, dapat dilihat melalui faktor agama, faktor kelompok minoritas seksual, faktor sosial, budaya, Pendidikan dan sebagainya (Hadi, 2008, p. 6). Akan tetapi untuk isu-isu tertentu yang sensitif, pengumpulan data bisa menggunakan *in-depth-interview* kepada masing-masing individu untuk

memperoleh reaksi penerimaan, pemahaman, dan interpretasi individu atas teks media yang ada. Sehingga diharapkan informasi yang diperoleh berujuk pada aspek kejujuran dan keterbukaan sesuai dengan tema yang dipilih (Hadi, 2008, p. 6).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Setelah mengamati fenomena yang muncul dalam pemberitaan mengenai teman-teman dengan ekspresi gender dan seksual orientasi yang berbeda (LGBT), penulis merumuskan masalah tersebut ke dalam satu pertanyaan, yakni bagaimana resepsi khalayak terhadap pemberitaan kasus mereka di Sindonews.com?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

1. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis berita melalui pemberitaan tersebut?
2. Pesan apa yang dapat diterima oleh khalayak setelah membaca pemberitaan tersebut?
3. Dimana posisi khalayak setelah memaknai pemberitaan tersebut?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh penulis berita.

2. Untuk mengetahui pesan apa yang dapat diterima oleh khalayak setelah membaca sebuah pemberitaan.
3. Untuk mengetahui dimana posisi khalayak setelah memaknai sebuah berita.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi untuk ke depannya, terutama pada konsentrasi jurnalistik. Penelitian ini juga dapat menjadi kajian tambahan dalam penelitian ilmu komunikasi terutama pada studi resepsi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengisi konten media massa. Hasil penelitian ini diharap bisa menjadikan masukan bagi media massa agar dapat memerhatikan pengemasan berita agar tidak ada kelompok tertentu yang merasa didiskriminasi oleh pemberitaan suatu media.

c. Kegunaan Sosial

Penulis berharap melalui penelitian ini masyarakat luas dapat memahami sudut pandang yang dimiliki oleh komunitas LGBT sehingga akan mengurangi tingkat diskriminasi terhadap komunitas tersebut.

1.6 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam unit analisis. Unit analisis yang digunakan hanya satu berita dikarenakan keterbatasan penulis dalam mencari penulis beritanya ataupun orang-orang di media tersebut yang dapat memberikan pernyataan terhadap pemberitaan yang sudah dibuat.